



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5798-5810

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Perspektif *Security Dilemma* di Kawasan Asia Timur: Transformasi Pertahanan dan Keamanan Jepang

Rezky Ramadhan Antuli^{1✉}, Riady Ibnu Khaldun², M Chaerul Anwar³, Muhammad Sajidin⁴, Danar
Hafidz Wardhana⁵, Dwi Rianisa Mausili⁶

Universitas Sulawesi Barat

Email: rezky.ramadhanantuli@unsulbar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Modernisasi pertahanan dan keamanan militer negara-negara di kawasan Asia Timur menjadi sebuah dilemma keamanan di kawasan. Meningkatnya anggaran belanja militer Jepang dari tahun ke tahun merupakan kekhawatiran terhadap bangkitnya negara-negara lain dalam aspek militernya seperti China dan Korea Utara. Di sisi lain masih berlangsungnya sengketa-sengketa wilayah yang terjadi di kawasan Asia mengharuskan Jepang untuk terus melakukan transformasi pertahanannya. Berdasarkan konsep security dilemma tindakan yang dilakukan oleh satu negara menjadi sebuah ancaman bagi negara yang lainnya. Meskipun upaya yang dilakukan hanya sebatas upaya pertahanan namun akan dinilai sebagai tindakan ofensif yang akan mengancam keamanan nasionalnya. Peningkatan keamanan dan pertahanan militer China dan Korea Utara di pandang sebagai ancaman oleh Jepang sehingga membuat Jepang melakukan upaya yang sama. Hal inilah yang menciptakan dilemma keamanan kawasan Asia Timur yang berdampak pada stabilitas keamanan kawasan bahkan global.

Kata Kunci: *Asia Timur, Jepang, Dilema Keamanan*

Abstract

The modernization of military defense and security for countries in the East Asian region has become a security dilemma in the region. The increase in Japan's military spending from year to year is a concern for the rise of other countries in military aspects such as China and North Korea. On the other hand, ongoing territorial disputes in the Asian region require Japan to continue to transform its military defense. Based on the concept of security dilemma, actions taken by one country become a threat to other countries. Even though the efforts made are only limited to defense efforts, they will be considered as offensive actions that will threaten national security. The increase in security and military defense of China and North Korea is seen as a threat by Japan, causing Japan to make the same efforts. This is what creates a security dilemma in the East Asian region which has an impact on regional and even global security stability.

Keywords: *East Asia, Japan, Security Dilemma*

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Timur merupakan salah satu wilayah yang berpengaruh dan penting bagi studi mengenai dinamika kawasan. Hal tersebut dikarenakan kawasan ini mempunyai sumber daya yang melimpah baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya hingga pertahanan militer. Kepemilikan sumber daya besar inilah yang kemudian mengundang respon dari negara-negara lain di luar kawasan. Negara-negara seperti Jepang, China, dan Korea Selatan merupakan negara-negara impian dari negara lain untuk dijadikan mitra dalam kerjasama internasional.

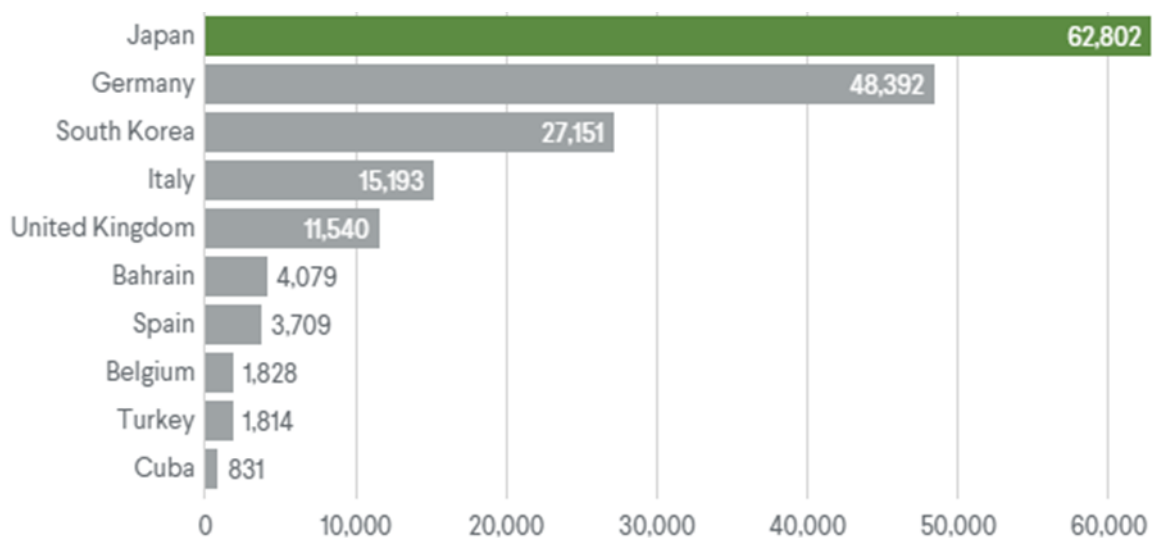
Umumnya kawasan Asia Timur mengalami dinamika atau perkembangan yang cukup signifikan setelah era perang dingin. Pasca perang dingin negara-negara di kawasan ini saling bersaing satu sama lain untuk dapat mencapai status sebagai negara yang maju. Perkembangan tersebut tidak hanya meliputi aspek ekonomi dan politik saja namun juga pada peningkatan pertahanan militer dan keamanan negara, demokrasi, serta isu- isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Maheswara dkk, 2020).

Jepang yang merupakan salah satu negara besar di kawasan Asia Timur juga mengalami perkembangan yang sangat pesat utamanya pada aspek keamanan dan pertahanan negaranya pada era sebelum dan sesudah perang dunia terjadi. Jepang harus memenuhi tuntutan dari para negara pemenang perang setelah Perang Dunia II berakhir. Momentum menyerahnya Jepang kepada negara sekutu menjadikan Jepang berada di bawah kendali pemerintahan sementara *Supreme Commander Alliance on Pacific (SCAP)* negara Amerika Serikat.

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, negara ini harus tetap berpegangan pada pola politik luar negeri Jepang yang sesuai dengan konstitusi demokrasi tahun 1947 dalam

menjalin hubungan luar negerinya dengan negara lain. Berdasarkan konstitusi yang diterbitkan pada tahun 1947 khususnya pada pasal 9 berhubungan dengan pertahanan Jepang, negara ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk dapat terlibat dalam perang. Hal ini disebabkan kekuatan militer spesifik pada persenjataan Jepang baik laut, darat, udara telah dilumpuhkan. Selain mencegah Jepang untuk terlibat kembali dalam perang yang akan muncul di kemudian hari konstitusi ini juga digunakan untuk mencegah serta menyelesaikan konflik internasional dengan menggunakan pendekatan kekuatan militer (Ayu, 2015).

Perjanjian antara Amerika Serikat dengan Jepang pada tahun 1960 kemudian mengalami perubahan. Hasilnya Amerika Serikat mendapatkan hak untuk mendirikan sebuah pangkalan militer di teritori Jepang dengan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta melindungi Jepang ketika sewaktu-waktu Jepang di serang oleh negara lain. Berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang menjadi sebuah pertanda eksistensi permanen pertamanya di kawasan Asia. Pangkalan militer tersebut setelah beberapa tahun kemudian mendapatkan respon protes di Jepang karena di nilai menjadi tempat dalam menyokong operasi tempur selama perang Vietnam.



Sumber: *U.S. Office of the Secretary of Defense*

Dari data di atas menunjukkan jumlah personil militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di negara-negara lainnya. Jepang di bawah rezim Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2015 menafsirkan kembali konstitusinya dalam suatu langkah bersejarah. Revisi ini memungkinkan penggunaan aspek militer Jepang untuk pertama kalinya akan tetapi dalam kondisi terbatas. Perubahan ini juga membantu membuka peluang besar Jepang dan Amerika Serikat dalam merevisi pedoman militer pertahanan keduanya sekali lagi. Kedua negara lebih fokus pada

aliansi yang terbangun sebagai tameng ancaman keamanan pada saat ini serta memperluas lagi jangkauan kerjasama dalam bidang pertahanan militer satu sama lain (Council on Foreign Relations, 2024).

Jepang di masa pemerintahan perdana Menteri Shinzo Abe mengalami perubahan signifikan dalam aspek politik dan keamanannya. Salah satu kebijakan yang di buat Abe adalah menguatkan peran negaranya dalam bidang militer dan Jepang. Abe beserta kabinetnya menyetujui reinterpretasi dari klausul pasifis yang di sebut dengan pasal 9. Sebagai pemimpin tertinggi Jepang, Shinzo Abe berupaya melakukan gerakan kampanye di kalangan masyarakat serta kalangan politik Jepang bahwa Jepang butuh untuk membentuk sebuah kekuatan pertahanan militer yang mumpuni. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan situasi keamanan di kawasan. Di sisi lain dengan bangkitnya ekonomi negara-negara di kawasan seperti China, Korea Selatan serta ancaman kepemilikan senjata pemusnah masal milik Korea utara nampaknya menjadi alasan utama Jepang harus melakukan perubahan serta transformasi dalam bidang pertahanan dan keamanan negaranya.

Asia Timur menjadi tempat tinggal bagi negara-negara yang sekarang memiliki kekuatan dan kemampuan yang besar dalam segala aspek. Bangkitnya negara-negara di kawasan ini bukan hanya menarik perhatian negara lain di luar kawasan untuk melakukan kerjasama internasional namun juga dapat menjadi pemicu konflik besar dalam dunia internasional. China sebagai negara yang mendominasi ekonomi dunia dewasa ini serta Korea Utara yang secara massif melakukan percobaan rudal balistiknya membuat Jepang merasa khawatir atas eksistensi kedua negara tersebut. Atas dasar inilah mengapa Jepang secara bertahap juga melakukan perubahan terhadap peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan nasionalnya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan menganalisis bagaimana perspektif *security dilemma* di kawasan Asia Timur terhadap transformasi pertahanan dan keamanan Jepang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bagaimana analisis perspektif *security dilemma* terhadap transformasi pertahanan dan keamanan Jepang berdasarkan interpretasi data-data atau informasi yang diperoleh peneliti. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur, artikel, jurnal, berita, laporan, situs resmi terkait isu penelitian yang relevan. Teknik penyajian data yang digunakan merupakan

penyusunan sekumpulan data yang telah didapatkan dan direduksi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Silalahi, 2012).

Kerangka Konseptual

Barry Buzan dan Ole Wever mengungkapkan konsep *security dilemma* merupakan kondisi spiral aksi dan reaksi dalam aspek keamanan termasuk pembangunan persenjataan sebuah negara dengan negara lainnya. Buzan menjelaskan negara-negara yang menunjukkan perilaku aksi dan reaksi dalam *security dilemma* dengan sebuah istilah *the action-reaction* model. Model yang disebutkan oleh Buzan ini menggambarkan perspektif klasik sebagai dasar bagi perkembangan perlombaan senjata (*arm race*) yang dilakukan oleh setiap negara di dunia khususnya negara yang konsen pada aspek pembangunan militer. Prinsip dasar dari model aksi dan reaksi ini adalah ketika satu negara merasa terancam oleh eksistensi dari negara lain maka negara tersebut akan melakukan peningkatan kekuatan persenjataan militernya

Struktur politik dalam sistem internasional yang anarki membentuk model aksi dan reaksi ini. Kondisi sistem internasional yang demikian menjadi sebuah ancaman keamanan bagi seluruh negara karena pandangan bahwa satu negara akan menjadi ancaman bagi negara yang lain dalam aspek kedaulatan, kelangsungan hidup, serta kesejahteraannya. Kondisi sistem internasional yang anarkis adalah bentuk dari hubungan politis antar negara yang pada akhirnya menciptakan perlombaan pembangunan militernya dalam garis pola aksi-reaksi. Negara-negara akan cenderung terperangkap dalam situasi "too much and too little" dalam upayanya untuk meningkatkan kapasitas pertahanan negaranya. Istilah *too much* berarti negara pada akhirnya mencapai atau berusaha mencapai tingkat kemampuan dalam melakukan tindakan agresi. Sedangkan *too little* karena negara-negara lainnya pasti juga akan melakukan tindakan yang sama yakni meningkatkan kemampuan kekuataannya sehingga membuat negara pertama tadi merasa terancam keamanannya (Barry Buzan dan Ole Wever, 2003).

Sebuah negara yang memiliki keinginan untuk mengembangkan atau meningkatkan aspek keamanannya melalui pembangunan persenjataan militer, sering kali akan di pandang oleh negara lain bahwa upaya tersebut merupakan tindakan yang berlebihan. Asumsi ini didasarkan bahwa apa yang menjadi keinginan sebuah negara untuk meningkatkan persenjataan militernya melebihi dari sebuah kebutuhan yang diperlukan dalam aspek keamanannya bahkan di nilai memiliki potensi kekuatan ofensif. Di sisi lain negara pertama merasa bahwa tindakan yang dilakukan tersebut terlalu sedikit karena mendapatkan respon dari negara yang lainnya. Negara yang lain juga akan melakukan hal

yang sama yakni meningkatkan persenjataan militer mereka juga sehingga dalam hal ini negara pertama memandang bahwa kondisi ini justru akan mengancam keamanannya karena merasa upaya mereka masih belum maksimal.

Negara pertama tadi akan terus melakukan upaya dalam peningkatan pembangunan kekuatannya sebagai respon akan negara-negara yang lain yang juga telah melakukan hal yang sama. Tindakan negara-negara ini akan terus terjadi dengan pola yang sama (proses aksi-reaksi) seperti sebuah model lingkaran yang tidak akan ada ujung akhirnya. Satu pihak merasa tindakan kesiagaan defensif pihak yang lain merupakan sebuah tindakan ofensif sehingga pihak tersebut akan menanggapi dengan melakukan kesiagaan persenjataan. Masing-masing pihak akan saling berlomba untuk menjadi pihak yang unggul sehingga tercipta kondisi perlombaan senjata dan pasukan (arm race). Kondisi seperti inilah yang kemudian menciptakan dilemma keamanan (security dilemma) dalam hubungan internasional (Little & Smith dalam Meilianawati, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Pertahanan Militer Jepang

Secara historis Jepang merupakan negara di kawasan Asia Timur yang memiliki kemampuan pertahanan militer yang diperhitungkan. Pada awal abad ke -20 Jepang berkembang menjadi negara dengan kekuatan militer yang mumpuni di dunia. Hal ini terlihat dengan adanya kekuatan angkatan laut kekaisaran Jepang yang pernah mengalahkan angkatan laut kerajaan Rusia dalam pertempuran perang Rusia-Jepang pada tahun 1904-1905 yang dikenal dengan pertempuran Selat Tshushima. Kemenangan perang ini memunculkan semangat ultranasionalis dalam militer Jepang bahkan pada tahun 1930-an Jepang memiliki keinginan untuk mendominasi atau menguasai kawasan Asia Timur dari aspek sumber dayanya hingga membebaskan negara Asia dari kolonialisme Eropa. Secara singkat Jepang berhasil menguasai kawasan Asia Timur hingga Asia Tenggara pada umumnya. Hal ini dikarenakan taktik serangan militer Jepang sangat mumpuni serta ketidaksiapan negara-negara di Asia Tenggara dalam membendung serangan Jepang (Abrianto, 2022).

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II juga menandai runtuhnya kekuatan pertahanan militer Jepang yang sempat mengalami kejayaan. Jepang dihadapkan dengan tuntutan untuk berpegang pada konstitusi 1947. Berdasarkan pasal 9 konstitusi tersebut membuat kekuatan militer Jepang baik darat, udara, laut mengalami kelemahan. Sebagai gantinya Amerika Serikat menjadi negara yang akan melindungi Jepang dari aspek keamanan nasionalnya. Melihat kondisi Asia Timur yang semakin berpotensi untuk

mengancam keamanan nasional Jepang, negara ini kemudian melakukan reformasi dalam aspek keamanan dan pertahanannya dengan melakukan peningkatan program politik keamanan. Program ini terlaksana dengan adanya rincian *National Defense Program Guidelines* (NDPG) yang menjadi panduan pertahanan Jepang dengan munculnya konsep *Dynamic Defense Force* (DDF) pada tahun 2010. Konsep ini memungkinkan Jepang untuk membentuk pasukan SDF yang lebih agresif dan mobilitatif. Program NDPG ini juga berisi tentang rancangan untuk meningkatkan kekuatan angkatan udara dan maritim Jepang dalam upaya menghadapi konflik serta serangan dari negara lainnya (Ayu, 2015).

Keseriusan Jepang dalam melakukan revolusi di bidang pertahanan dan keamanannya terlihat dari dinaikannya anggaran pada aspek tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 2000. Kenaikan anggaran tersebut sebesar 4.935 milyar yen dimana meningkat sebesar 0,3% dari anggaran belanja tahun 1999 yang menunjukkan angka 4.920 milyar yen. Besaran jumlah anggaran ini jika di hitung dalam mata dollar Amerika di tambah dengan menguatnya mata uang yen maka peningkatannya dari US \$ 43,2 milyar menjadi US \$ 45,6 milyar. Penambahan jumlah personil dan biaya pemeliharaan secara meningkat sebesar 15 milyar yen dalam anggaran belanja Jepang.

Aspek penyediaan peralatan militer menurun sebesar 34,4 milyar yen dimana karena adanya pergeseran kebijakan dalam Badan Pertahanan Jepang (Japan's Defense Agency). Pergeseran anggaran ini lebih difokuskan pada pembiayaan dalam pelatihan kapasitas kesiagaan dan intelijen negara. Melalui kerjasama Jepang-Amerika Serikat dalam program *Theater Missile Defense* (TMD) anggaran belanja didalamnya sebesar 2 milyar yen atau US \$ 17 milyar untuk membiayai sebuah proyek penelitian.

Jepang kemudian pada tahun 2007 meningkatkan anggaran pertahanannya lebih tinggi 1,5 persen dari anggaran tahun 2006 dimana mengalami kenaikan menjadi 41,75 miliar dollar Amerika Serikat. Anggaran sebesar tersebut digunakan oleh Jepang untuk proyek pengadaan, pengadaan senjata rudal, pengadaan kapal selam non nuklir yang terbaru, dengan teknologi yang lebih canggih, lebih senyap, mempunyai kemampuan sonar serta lebih kuat dalam menghadapi serangan lawan. Saat ini Jepang mempunyai 16 kapal selam konvensional yang tidak bertenaga nuklir disebabkan berdasarkan konstitusi Jepang yang menyebutkan tidak ada penggunaan nuklir dalam urusan keamanan dan pertahanan negara tersebut (Satrio, 2015).

Modernisasi militer serta perubahan postur pertahanan keamanan Jepang terlihat juga dari berbagai upaya yang dilakukan seperti meningkatkan kualitas persenjataan yang dimilikinya. Modernisasi dalam bidang militer Jepang dilakukan khusus pada garda terdepan dalam menangkal ancaman serta serangan musuh yakni angkatan udara dan

angkatan lautnya. Selama hampir 10 tahun dimana anggaran pertahanannya turun, pemerintah Jepang kemudian menaikkan kembali sekitar 2,1 triliun US dollar dalam mendukung program tersebut. Anggaran sebesar itu rencananya akan dilakukan oleh Jepang untuk modernisasi pesawat tempur F-15, membangun sistem pertahanan militer anti rudal, serta pengadaan P-3C untuk kepentingan keamanan wilayah lautnya. Jepang juga akan mendatangkan pesawat dengan kemampuan stealth F-35 yang diproduksi oleh Amerika Serikat.

Jepang secara resmi pada tahun 2012 memesan pesawat berkemampuan stealth tersebut. Selanjutnya Jepang telah memproduksi persenjataan yang berdasarkan pada cetak biru persenjataan yang berasal dari Amerika Serikat seperti pesawat F-16 serta helikopter. Transformasi Jepang dalam bidang pertahanan keamanan ini memiliki arti bahwa Jepang telah siap menjadi negara yang normal secara kapasitas dan kapabilitas militernya meskipun di lain sisi secara konstitusi belum terwujud dan siap untuk mengamankan negaranya dari ancaman yang datang dari negara lain khususnya negara-negara di kawasan seperti Korea Utara dan China yang sewaktu-waktu dapat menyerang negara tersebut (Rachmat, 2017).

Pada Desember 2022 Jepang secara mengejutkan melakukan sebuah transformasi kebijakan militer terbarunya. Transformasi tersebut ditandai dengan disepakatinya kebijakan ekspansi militer Jepang secara besar-besaran oleh Perdana Menteri Kishida Fumio sejak berdirinya *Self-Defence Forces* (SDF) (nama pasukan militer milik Jepang) pasca Perang Dunia II pada tahun 1954. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas militer Jepang saat ini tidak lepas dari adanya tiga dokumen utama yang akan merupakan pondasi bagi era baru pembangunan kekuatan militer negara tersebut. Ketiga dokumen utama tersebut adalah *procurement plan*, *national security strategy*, dan *national defence plan*.

Jepang memiliki keleluasaan dalam meningkatkan alokasi pengeluaran anggaran belanjanya dengan disepakatinya ketiga dokumen utama tersebut. Anggaran belanja yang sebelumnya hanya sebesar 1 persen dari total PDB negara naik hingga 2% yang nanti akan berlaku sampai pada tahun 2027. Meskipun kenaikan anggaran ini terlihat sangat kecil namun pada kenyataannya anggaran yang naik tersebut mencapai angka 320 milyar dollar Amerika. Dengan angka tersebut menempatkan Jepang pada posisi tertinggi ketiga sebagai negara dengan anggaran belanja militer terbesar di dunia. Posisi tersebut hanya kalah dengan Amerika Serikat dan China di posisi teratas. Anggaran sebanyak itu dapat dimaksimalkan Jepang dengan mengadakan persenjataan militer yang canggih yang dapat dikembangkan oleh Jepang dalam aspek pertahanan negaranya (Taufik, 2023).

Perspektif *Security Dilemma* dalam Transformasi Pertahanan dan Keamanan

Stabilitas keamanan di kawasan di Asia Pasifik dapat ditentukan oleh situasi yang berlangsung di sub kawasannya yaitu kawasan Asia Timur. Hal tersebut dikarenakan region ini menjadi tempat yang didiami oleh negara-negara besar yang secara ekonomi menjadi salah satu barometer perekonomian dunia internasional. Kemampuan negara-negara di kawasan ini mulai dari aspek ekonomi, politik, serta pertahanan militernya merata satu sama lain. Kondisi inilah yang kemudian membuat Asia Timur menjadi kawasan yang sangat rawan akan terjadinya konflik karena adanya rivalitas yang kuat diantara negara-negara kawasan. Adanya persaingan antara Jepang dan China, Korea Selatan dan Korea Utara, sering kali memicu ketegangan dalam berbagai isu bahkan mengundang negara-negara lainnya di luar kawasan untuk terlibat.

Munculnya China sebagai kekuatan baru dalam bidang ekonomi dan militernya dewasa ini berdampak pada perubahan dalam struktur di kawasan. Jepang merupakan negara yang massif merespon perubahan China di kawasan serta membuat hubungan rivalitas kedua negara semakin kuat. Meskipun sering kali pemerintah China dan Jepang melakukan berbagai perjanjian kerjasama diberbagai aspek namun tidak dapat merubah posisi mereka di dunia internasional sebagai dua negara yang bersaing sengit untuk menjadi yang terbaik di kawasan maupun dalam skala global.

Model spiral aksi-reaksi yang dikenalkan oleh Buzzan dalam kondisi ini terlihat dimana perubahan yang dilakukan oleh China dari aspek ekonomi dan militernya mendapatkan reaksi atau respon dari Jepang untuk melakukan hal yang sama khususnya dalam bidang pertahanan militernya. Preposisi dari model aksi dan reaksi kedua negara ini bahwa negara akan memperkuat persenjataannya karena adanya ancaman yang akan diterima dari negara lain. Jepang merasa perubahan yang dilakukan China menjadi ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

Masing-masing negara merasa terancam satu sama lain dengan adanya perkembangan ekonomi dan militer keduanya. Situasi ini menjadi fenomena umum diantara Jepang dan China di kawasan. Menariknya di saat China sedang fokus membangun armada militer mereka dengan mengadakan alusista dengan teknologi canggih, Jepang di satu sisi masih terus berjuang untuk mendapatkan kembali kesempatan dalam membangun kembali angkatan bersenjataanya. Jepang beberapa kali melakukan upaya untuk merevisi pasal 9 konstitusi Jepang dan semakin mendapatkan hasil yang positif. Ketegangan kedua negara ini tidak hanya sebatas pada persaingan ekonomi dan militer saja, sengeketa wilayah kepulauan Senkaku pun menjadi faktor penguat ketegangan kedua negara.

Situasi tanpa adanya otoritas tertinggi di kawasan Asia Timur dimana didalamnya menjadi tempat tinggal negara-negara yang memiliki kekuatan yang sebanding membuat

satu sama lain merasa tidak aman sehingga memunculkan rasa kecurigaan satu sama lain. Ketakutan serta kecurigaan negara-negara ini yang menjadi faktor terjadinya kompetisi untuk menjadi yang terkuat diantara mereka agar mendapatkan kedamaian. Hal ini selaras dengan disebutkan oleh Buzzan bahwa kondisi sistem internasional yang anarkis adalah bentuk dari hubungan politis antar negara yang pada akhirnya menciptakan perlombaan pembangunan militernya dalam garis pola aksi-reaksi. Negara-negara akan cenderung terperangkap dalam situasi "too much and too little" dalam upayanya untuk meningkatkan kapasitas pertahanan negaranya. Jepang memandang bahwa China sebagai negara di kawasan Asia Timur yang memiliki potensi untuk berkonflik dengan negaranya begitupun pandangan China terhadap Jepang. Kedekatan Jepang dengan Amerika Serikat pun semakin menguatkan kecurigaan dan kecemasan China di kawasan.

Peningkatan anggaran militer China dari tahun ke tahun tentu bukan tanpa alasan. China membangun dan memperkuat sistem militernya sebagai bagian dari adanya kekhawatiran terhadap potensi ancaman dari negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang dan negara-negara Asia Pasifik lainnya. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi China terus memperkuat kekuatan militernya. Asumsi-asumsi inilah yang dibangun oleh China kemudian berimplikasi terhadap peningkatan anggaran militer dalam memperkuat pertahanan dan keamanan negaranya. Dampak dari peningkatan militer China tersebut, menimbulkan berbagai *security dilemma* di kawasan Asia Pasifik terutama Jepang sebagai negara tetangga di Asia Pasifik.

Modernisasi pertahanan militer Jepang dengan meningkatkan anggaran militernya dari tahun ke tahun mempunyai alasan yang kuat. Jepang membangun dan memperkuat sistem militernya sebagai bagian dari adanya kekhawatiran terhadap potensi ancaman dari negara-negara Asia Timur lainnya seperti China dan negara-negara lainnya. Ditambah dengan kehadiran Korea Utara sebagai negara yang memiliki kekuatan militer yang mumpuni di kawasan. Beberapa waktu silam Korea Utara sering kali melakukan percobaan rudal balistik dan alusistanya yang berteknologi tinggi membuat Jepang semakin cemas dan khawatir akan keamanan nasionalnya. Hal ini yang menjadi faktor utama Jepang secara massif meningkatkan kekuatan dalam aspek militernya. Asumsi inilah yang dibangun oleh Jepang kemudian berimplikasi terhadap peningkatan anggaran militer dalam memperkuat pertahanan dan keamanan negaranya. Peningkatan pertahanan militer Jepang inilah menimbulkan berbagai *security dilemma* di kawasan Asia Timur.

Transformasi Jepang menjadikan negara ini sebagai negara yang mempunyai potensi untuk menjadi penguasa di kawasan Asia Timur. Hal ini merespon negara-negara lainnya karena di pandang sebagai ancaman. Seperti halnya dalam konsep *security dilemma* bahwa

sebuah negara yang memiliki keinginan untuk mengembangkan atau meningkatkan aspek keamanannya melalui pembangunan persenjataan militer, sering kali akan di pandang oleh negara lain bahwa upaya tersebut merupakan tindakan yang berlebihan. Negara lain khususnya China tidak ingin melihat Jepang tumbuh sebagai kekuatan utama dalam kawasan Asia Timur termasuk memiliki kekuatan militer yang mumpuni karena di nilai sebagai hal yang berlebihan.

Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang sangat merespon perubahan dan perkembangan China di berbagai aspeknya khususnya dalam aspek militernya. Jepang memandang China dan Korea Utara sebagai musuh utama di kawasan yang dapat mengancam keamanan nasionalnya. Jepang terdorong untuk melakukan upaya menaikkan anggaran militernya secara besar besaran karena melihat pengembangan kekuatan militer Korea Utara dan China yang setiap waktunya mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Meskipun upaya Jepang dalam menambah anggaran dalam bidang pertahanan keamanannya sebagai upaya defensif namun negara-negara lain khususnya China memandang bahwa hal inilah merupakan tindakan ofensif. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Sebagaimana dalam konsep *security dilemma* bahwa satu pihak merasa tindakan kesiagaan defensif pihak yang lain merupakan sebuah tindakan ofensif sehingga pihak tersebut akan menanggapi dengan melakukan kesiagaan persenjataan. Masing-masing pihak akan saling berlomba untuk menjadi pihak yang unggul sehingga tercipta kondisi perlombaan senjata dan pasukan (*arm race*).

Langkah-langkah yang diambil oleh Jepang dalam rangka mengimbangi kekuatan militer China, menjadi salah satu bagian dari kekhawatiran Jepang atas dominasi China dan negara lain di kawasan. Kondisi inilah yang kemudian membawa Jepang pada situasi *security dilemma*. Upaya yang dilakukan oleh Jepang akan menjadi dilemma buat negara lain meskipun pada dasarnya tidak ada niat untuk Jepang dalam melakukan tindakan ofensif kepada mereka. Sebaliknya upaya yang dilakukan China dan Korea Utara dalam meningkatkan pertahanan dan keamanannya hanya untuk sebatas tindakan pertahanan saja akan menjadi dilema juga buat Jepang. Hal ini akan berlangsung terus menerus dan tidak akan ada akhir dan ujungnya seperti sebuah bentuk lingkaran.

SIMPULAN

Transformasi dan modernisasi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur menjadi potensi konflik diantara mereka. Peningkatan aspek keamanan militer China, Korea Utara dan lainnya menjadi sebuah ancaman bagi Jepang. Meskipun tindakan yang dilakukan negara-negara tersebut adalah upaya untuk pertahanan namun Jepang

menilai bahwa hal tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi opsi penyerangan terhadapnya. Hal inilah yang kemudian merespon Jepang untuk melakukan hal yang sama dengan menaikkan anggaran pertahanannya dalam jumlah yang sangat besar tiap tahunnya. Salah satu upaya Jepang adalah mengadakan persenjataan dengan teknologi canggih dan menguatkan kembali hubungan dengan sekutunya Amerika Serikat dalam mengembangkan sistem pertahanan militernya.

Dalam konsep *security dilemma* tidak ada negara yang ingin menjadi yang tertinggal di banding negara yang lainnya terutama di kawasan Asia Timur. Satu negara tidak akan tinggal diam ketika melihat negara yang lain meningkatkan kemampuan militernya. Sama halnya dengan Jepang, kehadiran China dan Korea Utara di kawasan merupakan sebuah ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Ditambah dengan perubahan atau modernisasi yang dilakukan oleh kedua negara dalam aspek militernya, Jepang juga pasti akan melakukan hal yang sama bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh China dan negara lainnya.

Sebuah negara yang memiliki keinginan untuk mengembangkan atau meningkatkan aspek keamanannya melalui pembangunan persenjataan militer, sering kali akan di pandang oleh negara lain bahwa upaya tersebut merupakan tindakan yang berlebihan. Melihat kondisi negara-negara di kawasan Asia Timur terutama Jepang dan China, upaya keduanya dalam melakukan transformasi dalam aspek militernya akan di pandang secara berlebihan karena sewaktu-waktu hal itu akan menjadi tindakan ofensif. Hal inilah yang membuat masing-masing negara tidak akan saling percaya sehingga dapat mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan bahkan global.

DAFTAR PUSTAKA

Abrianto, Octaviadi. (2022). Sistem Pertahanan Jepang Pada Perang Dunia II Di Kawasan Hutan Lindung Pananjung, Pangandaran Imperial Japanese Army Defense System During World War II in Pananjung, Pangandaran. *Jurnal Panalungtik* 5(1): 46-60.

Ayu, Ananda. (2015). "Upaya Jepang Dibawah Pemerintahan Shinzo Abe dalam Meningkatkan Pertahanan Militer". *Jurnal Transformasi* 28 (11): 89-219.

Buzzan, Barry dan Weaver, Ole. (2003). *Region and Power the Structure in International Security*. Cambridge University Press: Cambridge.

CFR.org. (2024). The U.S.-Japan Alliance. Di akses melalui <https://www.cfr.org/background/US-Japan-Alliance>, pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 16.00 WITA.

Maheswara, Ida Bagus, Susanti, Sukma, Fasisaka, Idin. (2020). "Program Peningkatan

Militer Jepang di kawasan Asia Pasifik melalui NDPG (National Defense Program Guideline) pasca masuknya dukungan dari AS." Jurnal Hubungan Internasional 1 (1). Rachmat, N A. (2017). Security Dilemma Dalam Dinamika Hubungan Bilateral China dan Jepang. Jurnal Interdependence 5(1): 1-9.

Richard Little and Michael Smith, "Perspective on World Politics" dalam Meilianawati, Selly. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Extended Deterrence Amerika Serikat terhadap Kondisi Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea. eJournal Ilmu Hubungan Internasional 5(4): 1331-1338.

Silalahi, Ulber. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

Taufik, Muhammad. (2023). Kebangkitan Total Kekuatan Militer Jepang?. Di akses melalui <https://kumparan.com/muhammad-taufik-1672144073106359249/kebangkitan-total-kekuatan-militer-jepang-1zWu6Y7bjyV>, pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 16.00 WITA.